

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan pustaka**

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis, diantaranya sebagai berikut, pertama yaitu tinjauan pustaka guna memaparkan konsep dasar dari variabel yang diteliti, kedua yaitu penelitian terdahulu. Setelah itu membahas mengenai kerangka berpikir yang menjelaskan tentang model serta hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, kemudian diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

##### **2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan guna melahirkan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan lancar dalam berbagai sektor. Dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah harus lebih memperhatikan jika manusia merupakan objek dan subjek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan di berbagai sektor akan menciptakan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintah tersebut.

Menurut (Setiawan Putra & Dewa, 2015) pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu Negara. Dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa Indonesia diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu indikator terpenting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu peningkatam kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 1990 *The United Nations Development Programe* (UNDP) merumuskan pembangunan sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, pelayanan, kesehatan, penghasilan dan pekerjaan.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan (Endang , 2018).

#### **2.1.1.2 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) membangun indeks ini untuk

menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir (Badan Pusat Statistik, 2020).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. IPM mencoba memberikan peringkat kepada negara atau daerah berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan yaitu :

1. Usia Panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup.
2. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah.
3. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan, yaitu menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

Adapun status pembangunan manusia berdasarkan capaian pembangunan manusia disuatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Terdapat 4 kelompok status pembangunan manusia yaitu :

1. Kelompok “Rendah”:  $IPM < 60$ .
2. Kelompok “Sedang”:  $60 \leq IPM < 70$ .

3. Kelompok “Tinggi”:  $70 \leq \text{IPM} < 80$ .
4. Kelompok “Sangat tinggi”:  $\text{IPM} \geq 80$ .

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan manusia yang semakin baik ditandai dengan dijadikannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah (*fiscal gap*) dan memacu percepatan pembangunan di daerah. Alokator lain yang digunakan untuk mendistribusikan DAU adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Dengan adanya DAU diharapkan daerah yang mempunyai IPM rendah mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang mempunyai IPM lebih baik karena memperoleh alokasi yang berlebih. Namun hal ini tergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan dari masing-masing daerah dalam memanfaatkan kucuran

dana yang ada untuk mencapai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia secara lebih baik.

Mengukur kecepatan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capain tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka semakin cepat pula peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$IPM_t$  : Indeks pembangunan manusia suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$ : Indeks pembangunan manusia suatu wilayah paa tahun (t-1)

### **2.1.1.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* adalah merupakan salah satu alat ukur yang dapat merefleksikan status pembangunan manusia. *United Nations Programe (UNDP)* sejak tahun 1990 menggunakan IPM untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara dan mempublikasikannya dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yang digunakan sebagai indikator yaitu (i) bidang kesehatan : usia hidup (*loevity*) ; (ii) bidang pendidikan : pengetahuan (*knowledge*) ; dan (iii) bidang ekonomi : standar hidup layak (*decent living*).

### **1. Usia Hidup**

Pembangunan manusia atau upaya untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, harus terlebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup, tetapi dengan pertimbangan ketersediaan data secara global dipilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang bisa dinotasikan *eo*. Angka kematian bayi (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator dinilai tidak peka bagi negara-negara yang telah maju. Seperti halnya IMR, *eo* sebenarnya merefleksikan seluruh tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan.

Dalam suatu negara yang tidak memiliki sistem vital registrasi yang baik seperti Indonesia *eo* dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang dilahirkan masih hidup. Prosedur perhitungan *eo* dengan metode itu hanya efisien jika dilakukan dengan menggunakan Mortpak Lite atau software lainnya. Sebagai catatan, *eo* yang

diperoleh dengan metode tidak langsung merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

Sejauh ini ada tiga macam data yang dapat digunakan untuk memperoleh dua macam data dasar tersebut yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Periodisasi SP dan Supas adalah 10 tahunan, sedangkan periodisasi adalah tahunan. Sebagai catatan hasil perhitungan eo untuk tingkat kabupaten/kodya dari sumber-sumber data tersebut (khususnya Susenas) selalu harus dievaluasi secara cermat sebelum digunakan.

## **2. Pengetahuan**

Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sebagai catatan UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah dan tinggi sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua diakui kurang sesuai sebagai indikator dampak. Penggantian diakui semata-mata karena sulit memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global, suatu kesulitan yang bagi keperluan internal Indonesia dapat diatasi dengan tersedianya data Susenas Kor.

Indikator angka melek huruf dapat diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis. Pengolahannya dapat dilakukan

dengan menjumlahkan kasus berkode 1 (dapat membaca dan menulis) dan berkode 2 (dapat membaca dan menulis huruf lainnya), kemudian membandingkannya dengan jumlah seluruh kasus. Seperti halnya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dihitung dengan pengolahan tagulasi data Susenas Kor. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan data variabel secara simultan, yaitu: tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Perhitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal dihitung lama sekolah untuk masing-masing individu dengan menggunakan pola hubungan antar variabel-variabel tersebut. Pada tahap berikutnya dihitung rata-rata lama sekolah aggregate.

### **3. Standar Hidup Layak**

Selain manusia hidup, dan pengetahuan unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional UNDP memilih GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak.

Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang sesuai tidak

tersedia secara global. Selain itu dipertahankannya indikator inipun juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan mengetahui masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya, memasukan banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka GDP riil per kapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya.

Untuk keperluan perhitungan IPM Provinsi atau Kabupaten/Kota data dasar PDRB perkapita tidak dapat digunakan untuk mengukur standar hidup layak karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur data beli penduduk (yang merupakan focus IPM). Sebagai penggantinya digunakan konsumsi per kapita riil yang telah di sesuaikan untuk keoerluan yang sama. (M.Faqihudin, 2010).

Adapun indikator lain yang digunakan dalam pengukuran setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rumus yang digunakan sebagai berikut :

1. Dimensi Kesehatan

Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, dihitung dari hasil sensus, dan survei kependudukan.

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHHmin}{AHHmaks - AHHmin}$$

## 2. Dimensi Pendidikan

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani formal dan harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang terhitung pada penduduk berusia tujuh tahun ke atas.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLSmin}{HLSmaks - HLSmin}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLSmin}{RLSmaks - RLSmin}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

## 3. Dimensi Hidup Layak

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity (PPP)*. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dihitung dari level kabupaten/kota.

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PENGELUARAN) - \ln(PENGELUARANmin)}{\ln(PENGELUARANmaks) - \ln(PENGELUARANmin)}$$

Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao, sebagai berikut :

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan :

$P_{ik}$  : Harga komoditas  $i$  di Jakarta Selatan

$P_{ij}$  : Harga komoditas  $i$  di Kabupaten/Kota

$m$  : Jumlah Komoditas

Rata-rata geometrik yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Keterangan :

$I_{kesehatan}$  : Angka harapan hidup

$I_{pendidikan}$  : Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah

$I_{pengeluaran}$  : Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Pemilihan metode dan variabel yang tepat indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Namun, alasan utama yang dijadikan

dasar perubahan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setidaknya ada dua hal mendasar, yaitu :

1. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Angka Melek Huruf (AMH) di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik, dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif menyebabkan indikator komposit tidak relevan. Oleh karena itu, indikator Angka Melek Huruf (AMH) dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya adalah indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Indikator ini disadari bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita kurang menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah.

Menurut (BPS, 2016) pembangunan manusia terdapat tiga inti yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan kebutuhan pokok,
2. Peningkatan standar hidup.
3. Perluasan pilihan ekonomis dan sosial setiap individu.

### **2.1.2 Infrastruktur**

Menurut Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dan Asian Institute of Transport Development mengatakan infrastruktur digolongkan sebagai fasilitas fisik (jalan raya, sistem utilitas, sistem komunikasi, sistem limbah, fasilitas pendidikan dan kesehatan) serta layanan (sanitasi, transportasi dan energi). Kecukupan atau ketersediaan infrastruktur (Kusharjanto dan kim, 2011).

Tidak ada definisi standar dalam ilmu ekonomi tentang infrastruktur. Alasan dari hal ini adalah dikarenakan tidak terpenuhi situasi dari realisasi pada tiga analisis objektif yaitu : 1. Formulasi dari konsep pada kata “infrastruktur”; 2. Pembentukan dari pendekatan teoritis (contoh, teori tentang barang publik); 3. Deskripsi dari realita dari ketersediaan infrastruktur. Bertujuan untuk menggaris bawahi fitur dari barang pada waktu ke waktu dapat dikatakan bahwa kata “infrastruktur” dalam hal ekonomi merujuk pada dua kriteria besar yaitu : 1. Infrastruktur adalah barang kapital (tersedia dalam jumlah besar) pada penggunaannya yang berasal dari pengeluaran investasi dan berkarakteristik berdurasi panjang, sifatnya tidak dapat dibagi dengan teknis dan rasio capital-output tinggi; 2. Infrastruktur adalah barang, tidak harus dimiliki oleh sektor publik, melainkan pada penggunaan yang ekonomi untuk memenuhi kriteria dari tidak

terkecuali dan tidak bersaing dalam penggunaannya dimana menunjukkan preferensi aktivitas agen ekonomi (Torrise, 2010).

Klasifikasi infrastruktur dapat beragam menurut berbagai literatur sebagai contohnya adalah menurut Faradis dan Afifah (2020) dan Torrison (2010). Menurut Faradis dan Afifah (2020) infrastruktur dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Infrastruktur ekonomi : aset fisik yang berfungsi dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi. Contoh : jalan, pelabuhan, air
- b. Infrastruktur sosial : aset fisik yang mendorong kemajuan kesehatan dan pendidikan serta lainnya. Contoh : klinik, rumah sakit, sekolah, balai kepelatihan
- c. Infrastruktur administrasi/institusi : upaya penegakan hukum. Contoh : kepolisian, kejaksaan, kantor administrasi

Untuk mengukur dari infrastruktur dapat terbagi dua bentuk yaitu dalam bentuk moneter atau fisik. Dalam bentuk moneter, infrastruktur diartikan sebagai variabel stok atau arus. Ketika infrastruktur dalam kategori fisik, berkaitan dengan satuan ukur merujuk pada infrastruktur tersebut. Lebih lanjut penghitungan fisik tersebut dapat diartikan pada harga dari infrastruktur tersebut (Torrison, 2010).

### **2.1.2.1 Pendidikan**

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap individu untuk mendapatkannya. Pendidikan menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan manusia yang mampu membuat setiap individu menjalani kehidupan sosialnya. Pendidikan yang diterima mampu membawa individu ke arah kehidupan yang lebih baik. Pembangunan pendidikan butuh sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan tingkat pendidikan dari suatu masyarakat demikian pula dengan halnya distribusinya kepada setiap orang maupun wilayah. Demikian diharapkan setiap orang terpenuhi akan hak dan kebutuhan dari pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah umumnya dianggap sebagai transfer sosial. Dengan mengalokasikan anggaran terbesar dari sektor manapun, bangsa kita mengutamakan pendidikan. Karena berkaitan langsung dengan hak rakyat dan pembangunan sumber daya manusia ke depan, maka

pendidikan merupakan bidang yang sangat perlu mendapat prioritas negara. Dalam upaya mewujudkan pendidikan nasional yang lebih terjangkau dan bermutu, pemerintah mengeluarkan dana pembangunan pendidikan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) beberapa tahun lalu (Arifin , 2015)

Gagasan bahwa pendidikan adalah investasi menyebar dengan cepat, dan semakin umum disemua negara untuk mengatakan bahwa memperluas sektor pendidikan adalah prasyarat terpenting untuk memperluas industri lain. Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap ekspansi ekonomi. Konsep modal manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana pendidikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi dan keterampilan kerja. Sistem pendidikan yang baik juga akan menghasilkan tenaga kerja yang baik (Widiansyah *et al.* 2017).

#### **2.1.2.2 Kesehatan**

Pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak dasar yang layak diberikan kepada setiap individu. Rumah sakit, puskesmas maupun balai kesehatan menentukan tingkat kesehatan suatu masyarakat dan kemampuannya untuk memberikan layanan kesehatan (Badan Pusat Statistik, 2020). Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang berguna untuk menyediakan layanan kesehatan seperti halnya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok usaha, dan masyarakat berdasarkan UU No 36 Tahun 2009.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, pengelompokan rumah sakit berdasarkan penyelenggaraan, yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, dan rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah adalah unit pelaksana teknis dari instansi pemerintah (Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan BUMN/Kementerian Lainnya). Rumah sakit daerah adalah pelaksana teknis dari daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota). Sedangkan rumah sakit swasta adalah badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian, pengecualian bagi Rumah Sakit Publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain dilakukan upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. (Kementerian Kesehatan, 2019). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. (Kementerian Kesehatan, 2019).

Tingkat kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan kualitas hidup akan diukur dengan menggunakan salah satu variable kesejahteraan sosial. Karena pembangunan, kesehatan penduduk sangat penting bagi keberhasilan pembangunan

nasional diharapkan dapat berjalan lancar dengan penduduk yang sehat. Terkait dengan teori *Human Capital* bahwa SDM dianggap sangat signifikan untuk pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Karena itu, untuk mengembangkan sumber daya manusia diperlukan bagi negara-negara yang ingin mengalami pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Ekonomi modern membutuhkan pertumbuhan modal manusia, yang merupakan bentuk investasi (*investing in people*) (Nurjanah, 2014).

Setiap populasi Masyarakat tumbuh sebagai hasil dari peningkatan kesehatan, yang memberikan kontribusi untuk ekspansi ekonomi. Pembangunan sektor publik oleh pemerintah, khususnya dibidang kesehatan menjadi fokus utama dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapat banyak perhatian agar pemerintah dapat terus berupaya meningkatkan kualitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Safii & Silvia, 2018).

### **2.1.3 Jumlah Penduduk**

#### **2.1.3.1 Pengertian Jumlah Penduduk**

Badan Pusat Statistik (BPS) menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menentukan jumlah penduduk pada suatu wilayah dapat dilakukan dengan cara mengukur pada data demografi yang secara tepat atau akurat untuk dapat menjaringnya, kemudian pada saat menjaring

data tersebut dilakukan dengan tiga acara diantaranya ialah sensus, registrasi, dan survei penduduk.

Teori Jhon Stuart Mill, bahwa manusia dapat memengaruhi perilaku demografinya, jika produktifitas seseorang tinggi maka terdapat kecenderungan memiliki keluarga kecil (fertilitas rendah). Jika suatu saat terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan tersebut hanyalah bersifat sementara dan dapat ditanggulangi dengan mengimpor makanan atau memindahkan penduduk ke daerah lain. Jhon Stuart Mill menyarankan peningkatan Pendidikan sehingga penduduk lebih rasional mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada.

Paradigma baru tentang pembangunan sudah bergeser pada pentingnya pembangunan berdimensi pada manusia (people centered development). Banyak ahli yang mengatakan bahwa penduduk bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan tapi sekaligus sebagai subjek dari pembangunan. Karena disyaratkan bahwa penduduk harus ikut sebagai subjek maka dibutuhkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar benar-benar pembangunan yang diinginkan bisa tercapai. Keterlibatan penduduk dalam pembangunan perekonomian menjadi penting dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan. Kebijakan perluasan kesempatan kerja merupakan suatu kebijakan penting lainnya dalam pembangunan, karena selain sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi namun berikutnya juga dapat digunakan sebagai ukuran dalam mencapai kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang pesat pula. Banyak teori dan kerangka empiris telah membuktikan bahwa tenaga

kerja tidak saja dipandang sebagai satu bagian unit dalam penciptaan output (produksi), namun juga bagaimana kualitas tenaga kerja tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan nilai tambah. Oleh karenanya dilakukan upaya yang kuat untuk meningkatkan pemerataan pendapatan penduduk antara lain dengan penganugeragaman peluang kerja yang diciptakan oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini dimaksudkan agar penduduk mempunyai pilihan dalam upaya untuk memperoleh pekerjaan dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Eny, 2016).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk merupakan unsur penting dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Selain itu, konsumsi dari penduduk akan menciptakan permintaan agregat yang memicu kegiatan produksi yang ditekankan pada efisiensi dan produktifitas dari penduduk tersebut

Adapun faktor yang memengaruhi jumlah penduduk diantaranya :

1. Penduduk Alami (*Natural Increase*)

Jumlah penduduk yang jumlahnya didapat dari selisih antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian dalam suatu wilayah.

$$T = L - M$$

Keterangan :

T : Jumlah Pertumbuhan Penduduk per tahun

L : Jumlah Kelahiran per tahun

M : Jumlah Kematian per tahun

2. Penduduk Migrasi (*Net Migration*)

Jumlah penduduk yang jumlahnya didapat dari hasil selisih jumlah penduduk migrasi masuk dan jumlah penduduk migrasi keluar pada suatu wilayah.

$$T = I - E$$

Keterangan :

T : Jumlah Pertumbuhan Penduduk per tahun

I : Jumlah migrasi masuk per tahun

E : Jumlah migrasi keluar per tahun

3. Penduduk Total (*Total Population*)

Jumlah penduduk yang didapat dari selisih antara jumlah kelahiran pertahun dengan jumlah kematian pertahun ditambah dengan selisih antara jumlah penduduk migrasi yang masuk dengan jumlah penduduk migrasi yang keluar dalam suatu wilayah.

$$T = (L - M) + (I - E)$$

Keterangan :

T : Jumlah Pertumbuhan Penduduk per tahun

L : Jumlah Kelahiran per tahun

M : Jumlah Kematian per tahun

I : Jumlah migrasi masuk per tahun (penduduk yang masuk ke suatu negara/wilayah)

E : Jumlah migrasi keluar per tahun (penduduk yang meninggalkan ke negara/wilayah)

### **2.1.3.2 Indikator Jumlah Penduduk**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat beberapa faktor yang dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

#### **1. Fertilitas**

Lepasnya bayi dari Rahim seorang wanita terlepas dari durasi kehamilan, dengan adanya tanda-tanda bernafas atau menunjukkan bukti lain tentang kehidupan, seperti detak jantung, denyut nadi, dari kelahiran tersebut dianggap lahir hidup.

#### **2. Mortalitas**

Jumlah kematian pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan. Mortalitas merupakan indikator yang menentukan kesejahteraan penduduk dan merepresentasikan kualitas penduduk dalam suatu wilayah. Tingkat mortalitas yang rendah menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu wilayah, khususnya dalam bidang kesehatan.

#### **3. Migrasi**

Perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, baik melewati batas politis negara maupun batas administrasi atau batas bagian dalam suatu negara dengan tujuan menetap.

Banyaknya orang yang menempati suatu wilayah akan menentukan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk diukur dengan jumlah penduduk per kilometer persegi, adapun angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk

pertahun dalam jangka waktu tertentu disebut laju pertumbuhan penduduk. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah metode geometrik (Statistik, 2010). Berikut ini merupakan rumus laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode geometrik :

Keterangan :

$r$  : Laju pertumbuhan penduduk

$P_t$  : Jumlah penduduk tahun  $t$

$P_0$  : Jumlah penduduk tahun awal

$T$  : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun  $t$  (dalam tahun)

Tekanan penduduk pada suatu wilayah akan melahirkan kegiatan dalam mempertahankan atau memperbaiki standar kehidupan penduduk dalam mengorganisasikan diri menjadi semakin baik. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak penduduk semakin banyak angkatan kerja, yang berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, serta akan meningkatkan potensi pasar domestik. Sehingga mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Adapun beberapa cara dalam mengatasi pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat :

1. Pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program Keluarga Berencana (KB).
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan.
3. Menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk.
4. Melakukan program transmigrasi.
5. Melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melalui POSYANDU.
6. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan membangun puskesmas dan rumah sakit.
7. Menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.
8. Menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang Pendidikan.
9. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi.
10. Mengoptimalkan peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian.

#### **2.1.4 Penelitian Terdahulu**

Pada tabel 2.1 akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian ini, melalui penelitian terdahulu dapat diketahui pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen yang telah diuji pada penelitian sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun paparan mengenai penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(zadrun Maryozi, B.Insyandi, Ando Fahda Aulia, 2022 )  “Pengaruh pengeluaran bidang Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur jalan terhadap IPM di Provinsi Riau.”	Independen: - Pengeluaran bidang Pendidikan - Pengeluaran bidang Kesehatan - infrastruktur jalan  Dependen - IPM	Independen: - Infrastruktur jalan	Variabel Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM	Jurnal Niara Vol.15, No. 1 Mei 2022, Hal 1-11
2	(Dwi Putri, Menik Kurnia, 2022)  “Pengaruh indeks pendidikan, indeks kesehatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Sumatra Barat ”	Independen: - Indeks Pendidikan - Indeks Kesehatan  Dependen: - IPM	Independen: - Pertumbuhan ekonomi	Variabel Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap IPM	Jurnal Salingka Nagari Vol.01 No. 2, 2022 page 278-289
3	(Mujibaturrahmah, Vivi Silvia, 2023)  “Pengaruh infrastruktur pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Indonesia wilayah Barat.”	Independen: - Infrastruktur Pendidikan - Infrastruktur Kesehatan  Dependen: - IPM	Independen: -	Variabel Indeks Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Vol.8 No.2 Mei 2023 : 101 – 102 ISSN. 2549-8363
4	(Jehida Jean Sanny Mongan, 2019)  “Pengaruh pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Indonesia. ”	Independen: - Pengeluaran bidang Kesehatan - Pengeluaran bidang Pendidikan  Dependen: - IPM	Independen: -	Variabel Pengeluaran bidang Kesehatan dan Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap IPM	Indonesian Treasury Review Vol. 4, No.2 (2019), Hal.163-176)
5	(Jasasila, 2020)	Independen: - Tingkat kemiskinan	Independen: - Tingkat Kemiskinan	Variabel Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan

	“Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk terhadap IPM Kabupaten Batang Hari tahun 2011-2019”	- Jumlah penduduk  Dependen: - IPM		secara simultan atau berpengaruh signifikan terhadap IPM	Bisnis 11 (1), Mei 2020-40-44 ISSN. 2580-6882 (online) ISSN. 2087-5304 (print)
6	(Yuni Rinawati, Firda Aulia Nur Miftita, Fahmi Alif Aldianto, Muhammad Hafidz Faj’ri, Agus Eko Sujianto 2022)  “Pengaruh PDRB, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.”	Independen: - PDRB - Kemiskinan - Jumlah Penduduk  Dependen - IPM	Independen: - PDRB - Kemiskinan	Variabel PDRB dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM	Jurnal Ecogen Universitas Negeri Padang ISSN 2654-8429 Vol. 5 No.4 2022 Hal. 517-527
7	(Rizaldi Zakaria 2017)  “Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016.”	Independen: - Jumlah Penduduk -pengangguran - Kemiskinan -Pertumbuhan Ekonomi - Belanja Modal  Dependen -IPM	Independen: - Pengangguran - Kemiskinan - Pertumbuhan Ekonomi - Belanja Modal	Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM	Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia Hal.16.
8	(Liza Nurmaningsih, Wahyu Hidayat Riyanto, Dwi Susilowati)  “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Pengangguran Terhadap	Independen: - Jumlah Penduduk - Tingkat Kemiskinan - Jumlah Pengangguran  Dependen:	Independen: - Tingkat Kemiskinan - Jumlah Pengangguran	Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Tingkat Kemiskinan dan Jumlah	Jurnal Ilmu ekonomi Vol. 3, No.4, (November 2019) 505-516.

	IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.”	- IPM		Pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM	
9	(Amin Nasrulloh, Muh Syaiful Bakhri) “Analisis Pengaruh Dana Desa, Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur Pendidikan Terhadap IPM Kabupaten Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2016-2021.”	Independen: - Dana Desa - Infrastruktur Jalan - Infrastruktur Pendidikan  Dependen: -IPM	Independen: -- Dana Desa - Infrastruktur Jalan	Variabel Dana Desa dan Infrastruktur Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Infrastruktur Pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 10 No. 1 April 2023, 305-316
10	(Rasyid, Laksono Edi Lukito) “Hubungan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten”	Independen: - Infrastruktur Kesehatan, Pendidikan, Panjang Jalan -Angka Harapan Hidup -Angka Harapan anak sekolah  Dependen: -IPM	Independen: -Angka Harapan Hidup -Angka Harapan anak sekolah	Infrastruktur kesehatan, pendidikan, panjang jalan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM, AHH mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Angka harapan anak sekolah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM	Jurnal FEB, Universitas Islam Syekh Yusuf
11.	(Emilia Khristina Kiha, Sirilius Seran, Hendriana Trifonia Lau) “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu)	Independen: -Jumlah penduduk -Pengangguran -Kemiskinan  Dependen: -IPM	Independen: -Pengangguran -Kemiskinan	Jumlah penduduk, pengangguran dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM	Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora E-ISSN 2686 5661, VOL.2 NO. 07 - FEBRUARY 2021
12.	(Atika Putri Damayanti, Diah Hari Suryaningrum) “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan	Independen: -Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan - Pengeluaran Pemerintah	Independen -  Dependen -	Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM,	Jurnal Maneksi, VOL 12, NO. 3, SEPTEMBER 2023

	Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”	Sektor Pendidikan  Dependen: -IPM		Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM	
13.	(Yuli Wantri Simarmata, Deden Dinar Iskandar)  “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM: Analisa <i>Two Stage Least Square</i> Untuk Kasus Indonesia”	Independen: - Pengeluaran Pemerintah - Investasi - Jumlah Penduduk - Kemiskinan  Dependen: - Pertumbuhan Ekonomi - IPM	Independen: - Pengeluaran Pemerintah - Investasi - Kemiskinan  Dependen: - Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.	Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, JDEP Vol. 5 No. 1 (2022) hlm. 78-94
14.	(Stefanus Paulus Ratuludji, Preseveranda, Stanis Man)  “Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Pada 22 Kabupaten/Kota di NTT)	Independen: -Belanja Pendidikan -Belanja Kesehatan -Belanja Infrastruktur  Dependen: IPM	Independen: -Belanja Infrastruktur	Secara parsial belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Secara parsial belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Secara parsial belanja infrastruktur berpengaruh negatif dan	Edunomika – Vol. 08, No. 01, 2023

				signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.	
15.	(Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rumate, Hanly F.DJ. Siwu)  “Pengaruh Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sukawesi Utara”	Independen: -Pemerintah Sektor Pendidikan -Pemerintah Sektor Kesehatan  Dependen: IPM	Independen: -	Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 no. 02-Edisi Juli 2015

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini digunakan variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat dan variabel independen yaitu infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan jumlah penduduk.

### 2.2.1 Hubungan Infrastruktur Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan infrastruktur Pendidikan bukan menjadi kunci utama peningkatan IPM masyarakat. Faktor yang berpengaruh yaitu pola pembelajaran serta minat dan dukungan (pendanaan) dari pemerintah dalam program-program pendidikan. Temuan ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga, 2020) yang menemukan bahwa infrastruktur pendidikan tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM pada provinsi hasil pemekaran di Indonesia. Keberadaan sekolah secara fisik telah ada, namun terdapat beberapa kendala yang masih di hadapi dunia pendidikan di Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, susahya akses dari rumah menuju sekolah, hingga biaya

sekolah yang mahal menjadi permasalahan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Hal tersebutlah yang menjadi bukti bahwa sekolah bukan hanya diperbanyak aspek fisiknya saja, namun peningkatan kualitas sekolah yang membutuhkan perhatian khusus baik dari masyarakat dan pemerintah setempat. (Amin & Muh, 2023)

### **2.2.2 Hubungan Infrastruktur Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Dampak dari infrastruktur terhadap pembangunan beragam polanya. Ada infrastruktur yang menunjukkan dampaknya pada penurunan biaya produksi, hingga mempengaruhi secara tidak langsung yaitu dengan meningkatkan kesehatan dari setiap individu. Asumsinya diduga terdapat pengaruh infrastruktur yang positif dan nonlinear berhubungan dengan kekayaan publik (masyarakat) itu sendiri. Asumsi ini dibangun atas dasar, infrastruktur meningkatkan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kembali produksi pelayanan kesehatan yang pada lanjutnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan meningkatkan produktivitas pekerja dan output ekonomi. Lebih lanjut, pembentukan dari hal tersebut dapat meningkatkan dari kualitas efektivitas pekerja selain dari daya kemampuan pendidikannya (Agenor, 2010).

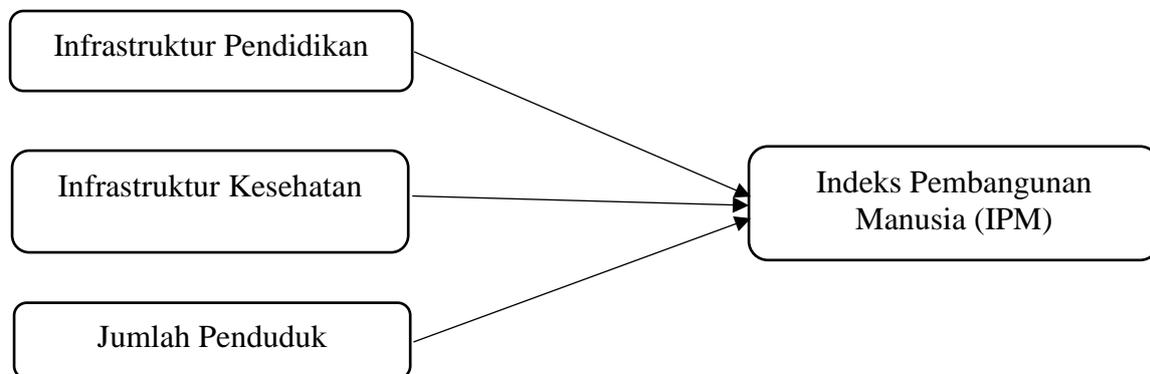
### **2.2.3 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Teori Jhon Stuart Mill, bahwa manusia dapat memengaruhi perilaku demografinya, jika produktifitas seseorang tinggi maka terdapat kecenderungan memiliki keluarga kecil (fertilitas rendah). Jika suatu saat terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan tersebut hanyalah bersifat sementara dan dapat ditanggulangi dengan mengimpor makanan atau memindahkan penduduk ke daerah

lain. Jhon Stuart Mill menyarankan peningkatan Pendidikan sehingga penduduk lebih rasional mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada.

Pada saat jumlah penduduk mengalami pertumbuhan maka dapat menaikkan IPM. Hasil ini ditunjukkan oleh adanya pengaruh positif dan signifikan dari jumlah penduduk terhadap IPM. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh (Jasasila, 2020), yang menyebutkan jika jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan dan ketika terjadi kenaikan penduduk maka akan menyebabkan peningkatan IPM.

Menurut (Rinawati, Firda, Fahmi, Muhammad, & Agus, 2022) hal yang mendasari berpengaruhnya jumlah penduduk terhadap IPM karena perusahaan perlu adanya tenaga kerja di dalam proses produksi. Pada saat perusahaan menginginkan terjadinya peningkatan output produksi maka tenaga kerja yang akan digunakan juga akan ditambah, oleh sebab itu kebutuhan terhadap tenaga kerja akan mengalami peningkatan. Semakin banyaknya penduduk yang dapat diserap sebagai tenaga kerja maka mereka mempunyai pendapatan yang bisa digunakan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti dapat mengakses sebuah layanan Kesehatan, mampu mendapatkan sumber-sumber kebutuhan guna hidup yang lebih layak.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis merupakan pernyataan awal peneliti yang dibuat berdasarkan rumusan permasalahan dan beberapa studi empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya, serta landasan teori menurut para ahli terhadap hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diteliti adalah :

1. Secara parsial Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022.
2. Diduga Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022.

## **BAB III**

### **OBJEK METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek penelitian**

Penelitian ini menganalisis pengaruh infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan jumlah penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022. Adapun variabel yang digunakan terdiri dari empat variabel. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan variabel terikat. Sedangkan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan jumlah penduduk merupakan variabel bebas.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , 2013), metode merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan maksud yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. analisis deskriptif merupakan suatu statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang lebih dalam dan luas. Sedangkan kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan proses data berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian mengenai apa yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan data dalam runtutan waktu (time series) dari tahun 2008 sampai dengan 2022 dengan diolah menggunakan Eviews-10 dan untuk mencari koefisien korelasi penelitian ini menggunakan analisis linear berganda.